

Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)

**Sudrajat
UPBJJ-UT Denpasar**

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Pertumbuhan sektor UMKM saat ini nampak menggembirakan. Peranan dan kegiatan usaha sektor UMKM terlihat meningkat sejak krisis ekonomi melanda negeri kita. Mengingat UMKM sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka adanya perlu pemberdayaan sektor tersebut. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Salah satu dari delapan tujuan pembangunan milenium adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendeklarasikan dan menyepakati tujuan pembangunan milenium maka pemerintah bersama-sama masyarakat mempunyai kewajiban untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan pembangunan milenium dapat dicapai salah satunya dengan pemberdayaan sektor UMKM. Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional serta mewujudkan tujuan pembangunan milenium tidak hanya kewajiban pemerintah saja tetapi kewajiban semua pihak yang berkepentingan.

Kata-kata kunci: Pemberdayaan UMKM, Perekonomian dan Pembangunan Nasional, Tujuan Pembangunan Milenium, Penanggulangan Kemiskinan

Perguliran era reformasi ternyata belum memberikan hasil positif pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat kita masih menghantui pembangunan di Indonesia. Menurut data statistik (BPS, 2012) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012. Walau secara statistik penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan selama kurun waktu Maret 2011–Maret 2012 kesejahteraan masih belum terwujud secara merata. Cita-cita bangsa

Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat dikatakan belum tercapai.

Masalah kemiskinan tidak saja menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia saja tetapi juga telah menjadi perhatian pemerintah seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para pemimpin dunia telah bertemu dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2011, untuk membahas persoalan bagaimana mengurangi kemiskinan di negara-negara paling miskin hingga target 2015. Dalam pertemuan tersebut, dimana Indonesia berpartisipasi di dalamnya, para pemimpin dunia telah berbagi pendapat mengenai bagaimana cara mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, yang telah menetapkan delapan tujuan: menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar secara universal; mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; mengurangi tingkat kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; menjamin keberlanjutan lingkungan; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Tujuan Pembangunan Milenium telah menjadi referensi penting bagi pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta dan lembaga donor. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama yaitu menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam hal ini UMKM dan koperasi. Peranan UMKM membantu perekonomian suatu daerah. Kehadiran UMKM tidak saja dalam rangka peningkatan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

1. Kemiskinan di Indonesia

Persoalan kemiskinan telah menjadi sedemikian peliknya untuk diurai dan dipecahkan, hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan tentang definisi kemiskinan, sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah untuk diselesaikan dalam satu pengertian. Secara konseptual perdebatan yang muncul selama ini dihadapkan pada dua sisi yang saling bertabrakan, yaitu mendudukan kemiskinan dalam aspek ekonomi

semata atau memposisikan kemiskinan sebagai isu sosial. Jika kemiskinan dianggap sebagai masalah ekonomi saja, maka kemiskinan biasanya disederhanakan dalam bentuk berapa pendapatan per kapita atau jumlah asupan makanan bergizi/kalori per individu, namun jika kemiskinan dianggap sebagai isu sosial maka memandang kemiskinan merupakan keterbatasan individu untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan, baik akibat dari ketidakmampuan ketrampilan, pendidikan atau akses untuk mendapatkan penghasilan sehingga individu tersebut tidak mampu untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Utomo (2011) karakteristik kemiskinan di Indonesia cukup bervariasi, hal ini membuat penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Ada tiga karakteristik atau ciri kemiskinan di Indonesia:

1. Banyak penduduk Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan, banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sedikit di atas garis kemiskinan, kelompok ini rentan terhadap kemiskinan.
2. Kemiskinan di Indonesia diukur dari segi pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari sisi pendapatan namun dapat dikategorikan miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Perbedaan karakteristik daerah yang besar di bidang kemiskinan, luas dan keragaman antar daerah di Indonesia merupakan ciri khas dari Indonesia, hal ini terlihat dengan adanya perbedaan antara pedesaan dan perkotaan dan juga kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat pelayanan dasar yang tidak merata di setiap daerah.

Menurut BPS (2012) jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun selama periode 1998-2011. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun, angka kemiskinan juga menurun. Selama periode 1999–2002 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9,57 juta orang dari 47,97 juta orang (23,43 persen dari total penduduk) menjadi 38,4 juta orang (18,2 persen dari total penduduk). Angka kemiskinan terus menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari total penduduk) pada tahun 2005. Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak pada tahun 2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar, kemiskinan tercatat

meningkat menjadi 17,75 persen (39,3 juta orang) pada tahun 2006, atau meningkat sebanyak 4,2 juta orang dibanding tahun 2005.

Meskipun demikian selama periode 2007–2011, angka kemiskinan kembali turun. Pada tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen). Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada 2011, persentase penduduk miskin tercatat menurun menjadi 12,49 persen (30,02 juta orang). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan secara umum masih terdapat banyak kelemahan dari kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut. Menurut Utomo (2011) Setidaknya ada lima kelemahan dalam penerapan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

1. Kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya disetiap wilayah (komunitas).
2. Definisi dan pengukuran kemiskinan lebih banyak di pengaruhi pihak luar (*externally imposed*) dan memakai parameter yang terlalu ekonomis. Implikasinya adalah konsep penanganan kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi dari hakikat kemiskinan itu sendiri.
3. Penanganan program pengentasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang dalam, sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang.
4. Kebijakan penanganan kemiskinan sering ditumpangi oleh kepentingan politik yang amat kental sehingga tidak mempunyai muatan atau makna dalam penguatan perekonomian masyarakat miskin.
5. Kebijakan kemiskinan kurang mempertimbangan aspek ekonomi kelembagaan sebagai prinsip yang dikedepankan sehingga sebagian kebijakan itu tidak berhasil karena program yang dirancang dalam pengentasan kemiskinan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat miskin.

Melihat kondisi diatas maka perlu adanya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapatan yang

diterima perkapita, namun perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah. Untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan di daerah maka perlu peranan pemerintah daerah yang baik dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini perlu dilakukan karena pemerintah daerah mempunyai atau mengetahui secara menyeluruh karakteristik kemiskinan di daerah tersebut. Disamping itu perlu adanya kelembagaan yang kuat dari organisasi ekonomi masyarakat miskin, hal itu perlu adanya fasilitasi dari pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi masyarakat miskin dengan melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping dari program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Tujuan Pembangunan Milenium

Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau disingkat *MDGs*) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Inti dari deklarasi milenium ini adalah delapan tujuan pembangunan milenium seperti telah disebutkan di atas. Diluar ke-8 tujuan tersebut, deklarasi milenium juga membahas isu-isu penting lainnya seperti perdamaian, keamanan dan pelucutan senjata, HAM, demokrasi dan ketatapemerintahan yang baik, kebutuhan khusus bagi Afrika dan

penguatan kelembagaan PBB. Nilai-nilai yang mendasari deklarasi milenium adalah: kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam dan pertanggungjawaban bersama. Tujuan Pembangunan Milenium kemudian dimatangkan lagi dalam pertemuan tingkat tinggi delapan negara maju (G8) di Evian, Prancis pada akhir 2003.

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDGs pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

Paparan program dalam MDGs tentu saja merupakan konsep ideal, namun dalam implementasinya diperkirakan akan banyak menemui kendala di lapangan dan kemungkinan besar akan sulit memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kritik terhadap MDGs terkait dengan persoalan ketergantungan negara-negara anggota pada negara donor. Pendanaan dari negara-negara biasanya disertai berbagai persyaratan yang pada akhirnya justru memberatkan negara penerima bantuan. Negara donor sering memasukkan agenda tersembunyi terhadap negara yang dibantu dimana agenda-agenda tersebut seringkali tidak terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas kehidupan manusia tetapi lebih mengenai faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam batas tertentu kadang-kadang tidak berarti apa-apa bagi orang miskin sehingga perlu konsep pembangunan yang benar-benar berpihak kepada mereka.

Forum masyarakat sipil se-Asia Pasifik di Bangkok, pada 6-8 Oktober 2003 secara spesifik menghasilkan kritik terhadap MDGs antara lain:

1. Tujuan pembangunan milenium merumuskan kemiskinan dalam konteks visi, ruang lingkup dan arah secara sempit, mengenyampingkan HAM
2. MDGs tidak memberikan sebuah peninjauan ulang analisa yang dalam terhadap perubahan kebijakan dan institusi. Dengan demikian menghubungkan MDGs

dengan perangkat resep-resep utama seperti yang disodorkan oleh Bank Dunia dan IMF akan menjadi pendekatan yang salah.

3. Perhatian dan sumber daya keuangan dari negara-negara maju justru dialihkan jauh dari prioritas untuk kemiskinan dan malah dialokasikan untuk pelayanan hutang dan pembelanjaan kebutuhan militer.

Selain kritikan terhadap Tujuan Pembangunan Milenium, keberhasilannya juga dipertanyakan banyak kalangan. Salah satunya Andy Sumner (VOAIndonesia, Juni 2012) mengevaluasi keefektifan MDGs dalam makalah berjudul “Lebih Banyak Uang atau Lebih Banyak Pembangunan: Apa yang Sudah Dicapai Tujuan Pembangunan Milenium?” Ia mengatakan, “Ada perdebatan panas mengenai apa yang akan terjadi setelah 2015 ketika sasaran-sasaran ini berakhir. Apakah harus ada lebih banyak sasaran? Apakah kita harus betul-betul ambisius mengakhiri kemiskinan dunia, katakanlah, pada tahun 2030? Mungkin berguna untuk melihat apa yang betul-betul telah dicapai dalam 10 tahun terakhir dan mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai hasil MDGs.”

Sumner adalah pakar masalah pengentasan kemiskinan dan kerentanan pada Lembaga Kajian Pembangunan di Universitas Sussex. Ia mengatakan banyak yang dipertanyakan mengenai apa yang disebutnya dokumen yang secara hukum lemah. Menurut Sumner MDGs sendiri tidak pernah ditandatangani oleh para kepala negara. Yang ditandatangani mereka adalah deklarasi yang disebut Deklarasi Milenium tahun 2000, yang sasaran-sasarannya ditetapkan. Tidak punya kekuatan hukum, karena apabila tidak terpenuhi, tidak ada yang bertanggung jawab. Mungkin itulah pertanyaan yang perlu diajukan jika ada serangkaian tujuan internasional lainnya untuk mengurangi kemiskinan.

Sumner mengatakan tujuan untuk mengurangi kemiskinan separuhnya menjelang tahun 2015 menyatakan masih ada sebagian tujuan yang belum tercapai. Sumner mengatakan ada nilai simbolik di dunia yang mengatakan cukup peduli dengan kemiskinan dan menetapkan sasaran untuk menguranginya. Nyatanya, katanya, itu mungkin merupakan salah satu bidang di mana ada kesepakatan internasional. Masalahnya sekarang apa yang terjadi setelah 2015? Apakah rencana yang dicapai 2015 diperbaharui untuk melanjutkan MDGs?

Tenggat waktu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Pemerintah Indonesia hanya tersisa tiga tahun lagi. Australia (Okezone, Januari 2012) memberi dukungan agar fokus pencapaian target menyentuh seluruh Nusantara. Melalui program bantuannya AusAID, Australia sangat mendukung Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dengan menjadi mitra pembangunan terbesar bagi Indonesia. Pimpinan AusAID Indonesia Jacqui De Lacy, dalam keterangan pers Kedubes Australia kepada Okezone, Selasa (31/1/2012) mengatakan Indonesia telah melakukan kemajuan besar untuk

membantu masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan, memastikan anak-anak bersekolah, mendukung perempuan dan membuat persalinan lebih aman. Namun masih banyak yang perlu dikerjakan.

Sebagai bagian dari komitmen ini, AusAID menjadi sponsor acara MDGs Awards 2011 dan turut berpartisipasi dalam pameran yang menampilkan berbagai pencapaian MDGs yang diadakan di Balai Kartini Convention Centre pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari. Indonesia MDGs Awards 2011 merupakan penghargaan yang mengapresiasi individu-individu dan organisasi-organisasi yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target tersebut. Penghargaan ini diharapkan menginspirasi upaya-upaya penanganan kemiskinan dan berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Australia mengalokasikan dana hibah sekitar 558,1 juta dolar Australia atau sekira Rp 5,3 triliun (Rp 9,559 per dolar Australia) untuk program pembangunan Indonesia di tahun anggaran 2011-2012. Program-program bantuan dari AusAID telah memberikan ruang belajar bagi lebih dari 330.000 siswa, melatih lebih dari 5.000 pekerja kesehatan dan telah memberikan akses jaringan air bersih dan sanitasi kepada sekitar 350.000 warga Indonesia.

3. Pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan (Depkop, 2012) mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Indonesia meningkat pesat dua tahun terakhir. Bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Jumlah UMKM yang terus meningkat ini diharapkan bisa sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Sebagai catatan, rata-rata UMKM bisa menyerap 3–5 tenaga kerja. Dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit UMKM, dalam dua tahun terakhir, jumlah tenaga yang terserap bertambah 15 juta orang. Melihat peran UMKM yang begitu strategis maka UMKM dapat mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga

mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU No. 20/2008).

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sijabat, peneliti pada Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM mengatakan upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama era reformasi juga terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (akselerasi) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. Disinilah mungkin letak pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut. Belum efektifnya isu-isu politik yang berkembang selama era reformasi mengindikasikan bahwa proses komunikasi politik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik yang efektif diharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Dengan kondisi yang masih seperti sekarang jangan diharapkan akan ada tenggang rasa dari para pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk bermitra antara pengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa dan diikat dengan peraturan formal, begitupun belum dapat berjalan dengan efektif.

Lebih lanjut Sijabat mengatakan pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang dibangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (*multies years*). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu

rezim pemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Seberapa jauh keberhasilan membangun sistem pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari seberapa besar angka pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan usahanya.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Menurut Karsidi dan Irianto (2005) keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain. Berikut diberikan pola alternatif hubungan antar peran masing-masing *stakeholder* UMKM yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UMKM:

1. UMKM

UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat kunci dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari bahwa untuk setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendampingan pula.

2. Kelompok / Koperasi

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistim kelompok karena dapat mengurangi resiko dan mudah dalam pembinaannya. Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku maupun penjualan produk.

3. BDS (*Business Development Services*)

BDS ini berperan sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, seperti aspek manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Idealnya jasa layanan yang diberikan BDS harus dapat ditanggung pembiayaan oleh UMKM sendiri, namun sampai saat ini belum banyak UMKM yang mampu menanggung atas jasa yang diterima. BDS dapat didirikan oleh Perguruan Tinggi, LSM maupun swasta.

4. Asosiasi Usaha

Asosiasi Usaha dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek melalui anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun sistim pembayaran dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

5. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankan terhadap UMKM, salah satunya dengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam (KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap UMKM.

6. Pasar

Pasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa pasar dalam negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku UMKM dan pelaku pasar (pembeli maupun eksportir) perlu dijaga kesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi pasar harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, BDS maupun Asosiasi usaha.

7. Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang dalam memfasilitasi UMKM Lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti koperasi, Asosiasi, BDS, dan lembaga keuangan dapat digerakkan oleh pemerintah dengan kebijakan tertentu.

Menurut Suarja (2007) pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui: a) revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perekonomian

nasional dan b) revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses KUMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha; c) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan d) Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempercepat pemberdayaan UMKM antara lain; (1) tersedianya SDM yang berkualitas dan profesional, (2) tersedianya dukungan regulasi yang kondusif, (3) tersedianya pengawasan yang efektif, (4) tersedianya teknologi informasi yang murah, dan (5) tersedianya pembiayaan modal yang mudah diakses (Baseline Report, 2000 dalam Assery, 2009).

Penutup

Untuk mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pemberdayaan UMKM. UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Daftar Referensi

- Anonymous. ----- . Tujuan Pembangunan Milenium. http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium. Diunduh tanggal 20 Juni 2012.
- Anonymous. 2004. Tujuan Pembangunan Milenium. <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/Aif36.htm>. Diunduh tanggal 20 Juni 2012.
- Anonymous. 2011. UMKM Primadona Ekonomi Indonesia. <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/02/08/umkm-primadona-e...> Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Anonymous. 2012. UMKM Serap Tenaga Kerja Lebih Besar. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=articl... Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Anonymous. 2012. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <http://bum-ukm.com/berita/22/Pemberdayaan-Koperasi-dan-Usaha-Mikro...> Diunduh tanggal 20 Juni 2012
- Anonymous. 2012. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs); Sebuah "Mission Impossible"? . <http://www.berdikarionline.com/editorial/20100923/tujuan-pembangunan...> Diunduh tanggal 20 Juni 2012.

- Anonymous. 2012. Keberhasilan Tujuan Pembangunan Milenium PBB Dipertanyakan. <http://www.voaindonesia.com/content/keberhasilan-tujuan-pembangunan-...> Diunduh tanggal 20 Juni 2012.
- Assery, S. 2009. Strategi Mempercepat Pemberdayaan UMKM. *Harian Suara Merdeka*, 27 Mei 2009.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2012. *Berita Resmi Statistik*, No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2012.
- Karsidi, R & Irianto, H. 2005. Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta. *Dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah*. Hotel Sahid Raya Solo, 30 Juni 2005.
- Nugraha, F. 2012. Australia Dukung Tujuan Pembangunan Milenium RI. <http://international.okezone.com/read/2012/01/31/411/566615/australia-d...> Diunduh tanggal 20 Juni 2012.
- Sijabat, S. 2008. Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM. *Infokop*, 16. 1-17.
- Suarja, W. AR. 2007. Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan. http://smecda.com/deputi7/file_makalah/IPB-BOGOR.pdf. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Utomo, S. J. 2011. Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. http://fe.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&view=a.... Diunduh tanggal 25 Juni 2012.